

**LAPORAN HASIL KUNJUNGAN KERJA KOMISI III KE KANTOR BALAI BESAR
WILAYAH SUNGAI SUMATERA VIII (BBWSS VIII) DI PALEMBANG DALAM
RANGKA KOORDINASI TINDAK LANJUT DARI DIREKTORAT SUMBER DAYA
AIR KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM RI TENTANG PENGEMBANGAN
KEGIATAN BALAI BESAR SUMBER DAYA AIR SUMATERA VIII UNTUK
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TANGGAL 20 S.D. 22 OKTOBER 2019**

I. Dasar Pelaksanaan

1. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor /DPRD/2010 tentang Perubahan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Periode 2019-2024.
2. Jadwal Kegiatan DPRD Prov. Kep. Bangka Belitung bulan Oktober 2019.
3. Surat Tugas Pimpinan DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung nomor : 093/953/ST/DPRD/2019

II. Pelaksanaan

1. Hari/tanggal : Minggu s.d. Selasa, 20 s.d. 22 Oktober 2019
Pukul : 09.30 WIB s.d. selesai
Tempat : Kantor Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera VIII di Palembang
Agenda : Koordinasi Tindak lanjut dari Direktorat Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum RI tentang Pengembangan Kegiatan Balai Besar Sumber Daya Air Sumatera VIII Untuk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

III. PERSONALIA

❖ Komisi III DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

- | | | |
|----|-----------------------------|-------------|
| 1) | Efredi Effendi | Ketua |
| 2) | Ir. Agung Setiawan, MM | Wakil Ketua |
| 3) | Rina Tarol, SE | Sekretaris |
| 4) | Ferdiyansyah, A.Md | Anggota |
| 5) | H. Aksan Visyawan, S.ST, MH | Anggota |
| 6) | Ir. H. Azwari Helmi | Anggota |
| 7) | Firmansyah Levi | Anggota |

- | | | |
|-----|---------------------------|---------|
| 8) | Rudi Hartono | Anggota |
| 9) | Eka Budiarta, S.Mn., M.Si | Anggota |
| 10) | Ir. Hendriyansen | Anggota |
| 11) | Herwina, S.AP | Notulis |

❖ Mitra Komisi III DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

- | | | |
|----|-------------------|-----------------------|
| 1) | Joni R. Putra | Kabag TU BBWSS VIII |
| 2) | Dave Ruchaidin | Kabid PSSA |
| 3) | Arie Adrian Lubis | Kasi Perencanaan Umum |
| 4) | Sistoyo | Kasi Program |
| 5) | Dian Anggraini | Kasi SUPAn |
| 6) | Yul Hendro W | Kasi Perencanaan OP |

IV. HASIL PERTEMUAN

Dari pertemuan antara Komisi III DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Kantor Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera VIII di Palembang Dalam rangka Koordinasi Tindak lanjut dari Direktorat Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum RI tentang Pengembangan Kegiatan Balai Besar Sumber Daya Air Sumatera VIII Untuk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dapat dilaporkan sebagai berikut :

1. Rapat diPimpin Oleh Ketua Komisi III mengatakan bahwa maksud dan tujuan Kunjungan Kerja Komisi III ini, bahwa Balai ini Cuma ada 2 (Palembang dan Babel) sementara Bengkulu dan Lampung sudah terpisah, sehingga Bangka Belitung juga ingin memisahkan/mendirikan Balai Sendiri. Dan memberikan kesempatan kepada anggota Komisi III untuk menyampaikan pertanyaan-pertanyaan.
2. Di Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera VIII ini merupakan Perpaduan antara Bangka Belitung dan Palembang (Sumatera VIII). Dilihat dari Pola Anggaran, bahwa Bangka Belitung atau Sumatera Selatan dalam pola anggaran yang diterapkan, karena masih merupakan perpaduan dan bagaimana sistem kegiatan yang dirancang dalam pola anggaran tersebut
3. Dilihat dari Undang-Undang nomor 02 Tahun 2017 dan diterbitkan Permen Pu No. 07 tahun 2019 bahwa didalamnya menyangkut sertifikasi Kompetensi Kerja (SKT) yang sudah berjalan sekarang kemudian ditindaklanjuti oleh Surat Gubernur Kepulauan Bangka Belitung bahwa di Bangka Belitung itu mengikat Tenaga kerja Keterampilannya. Didalam hal ini sudah berapa jauh di Balai Ini memakai sertifikasi Kompetensi yang sudah di salurkan dilapangan.
4. Di Bangka Belitung ini banyak sekali kolong-kolong, artinya bahwa kalau tidak ditata dengan baik, mungkin aliran airnya tidak benar, langkah-langkah apa yang dilakukan oleh BBWS VIII dalam mengantisipasi Banjir.

5. Di Belitung Ada Embung (Mentas), merupakan suatu Kontruksi Bangunan yang sudah selesai, tapi asas manfaatnya sampai sekarang belum ada, kalau kita lihat bahwa di dalam UU no.2 Tahun 2017 tidak ada kegagalan Kontruksi, tetapi asas manfaatnya yang belum, mohon ada tindaklanjuti dari kegiatan tersebut.
6. Di Balai ini, Apakah Konsultan Daerah dilibatkan didalam hal Perencanaan atau Disain. Karena kita tau Konsultan daerah ini sulit maju apabila tidak dilibatkan didalamnya, di Balai Besar ini kontruksinya cukup tinggi, menengah keatas. Jadi konsultan lokal ini tidak dilibatkan, mereka juga tau daerahnya, apakah ada kerjasama operasional atau join operation terhadap konsultan Lokal ini sehingga mereka lebih maju kedepan.
7. Terkait untuk menjadikan Balai Sendiri untuk memisahkan wacananya sudah lama sejak tahun 2009, tetapi harus dikaji lagi oleh Pusat/ Jakarta. Wilayah sungai karena di Bangka Belitung yang masuk wilayah sungai Strategis Nasional itu sungai Bangka, karena Belitung itu masuk wilayah sungai Provinsi. Dilihat dari Peninjauan Langsung Kelapangan oleh Direktur irigasi sendiri ke PC, ke Mentas, harusnya berdiri sendiri. Mudah-mudahan pengambilan dari pusat dapat mengkaji hal tersebut. Karena BBWSS VIII ini membawahi 2 Provinsi utuh, yaitu Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Bangka Belitung. Sedangkan Provinsi Bengkulu dan Provinsi Lampung sudah berdiri sendiri.
8. Kepala Balai ini sangat Repot dan berat untuk berkoordinasi dengan 4 (empat) Gubernur, 4 (empat) Kejati, 4 (empat) DPRD dan 4 (empat) Kapolda. Dan ini merupakan sangat berat beban kerjanya yang dipegang oleh BBWSS VIII (sebelum pemisahan).
9. Pola anggaran BBWSS VIII ada Musrenbang setiap Tahun, yang menampung semua aspirasi dari bawah. Dari Dinas-Dinas Provinsi, Kabupaten/Kota dan Balai-Balai dikumpulkan untuk membahas usulan tahun 2020. Kenapa Pola Anggaran di Sumatera Selatan begitu Besar ini karena luas beban kerjanya cukup besar.
10. Undang-Undang nomor 02 Tahun 2017 dan diterbitkan Permen Pu No. 07 tahun 2019 bahwa didalamnya menyangkut sertifikasi Kompetensi Kerja (SKT), jadi untuk Bangka Belitung sendiri setiap Tahun diadakan Sertifikasi Kompetensi Kerja (SKT) dan dibawah Balai sendiri yaitu; Balai Jasa Kontruksi sesuai dengan Program-Program yang dicanangkan.
11. Untuk Kolong-kolong tambang yang Exs Timah yang ada di Bangka Belitung sudah kami Data, mana sungai yang aktif dan mana yang tidak aktif lagi. Karena sudah banyak permintaan dari PDAM dan Pemerintah daerah untuk minta dimanfaatkan sebagai Sumber Air Baku maupun sebagai Konservasi (mengatasi banjir) termasuk Embung Mentas. Dari hasil Kunjungan Kerja Anggota Dewan yang Periode yang lama menindaklanjuti mentas ini. Sebenarnya BBWSS VIII sudah melakukan MOU sebelum Bangunan itu di Bangun pada tahun 2016

bersama Perjanjian Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Kementerian PU, Direktur Jenderal SDA, Direktur SPAM dan Dirjen Cipta Karya, di dalam hal tersebut ada pasal-pasal yang harus dilaksanakan masing-masing dan ada kesepakatannya. Dirjen SDA membangun Embung, Dirjen Cipta karya akan melanjutkan membangun WTP, dilanjutkan dengan instalasinya sampai ke user pemanfaatan. Di tahun 2017 Cipta Karya harus sudah membangun WTP, mungkin terkendala ada prioritas Program jadi hal tersebut belum bisa dilaksanakan, pada tahun 2020 sudah dianggarkan untuk pembangunan WTP beserta jaringannya distribusinya.

12. Untuk mengatasi Banjir di Pangkalpinang, jadi isu ini yang sudah lama, dan sudah mau ditindaklanjuti tapi sampai saat ini belum tender. BBWSS VIII mendapatkan dana Loan dari Korea, untuk penanganan Banjir, bukan cuma Kota Pangkalpinang, pulau Bangka dan ada 4 (empat) Kota di Indonesia, yaitu Riau, Batam, dan Jawa Barat. Sampai saat ini sudah persiapan tender Perencanaan, dan akan dirancang, BBWSS VIII akan memanipulasi banjir di Pulau Bangka yaitu Kolong Kacang Pedang dll mau dimanfaatkan, nanti desainnya akan dikerjakan Konsultan Korea, memang Konsultannya ini prosesnya baru ditender. Dan direncanakan 2 (dua) bulan kedepan akan dilaksanakan tender. Nanti Perencanaannya (Master Plainnya) dan Desainnya dilakukan selama 2 (dua) tahun, kemudian baru dilanjutkan konstruksi, nanti diupayakan menggunakan dana Lon dari Korea, tapi dalam waktu perencanaan ini bukan berarti penanganan Banjir ini berhenti, tapi BBWSS VIII akan melakukan penanganan Banjir yang sifatnya Sport.
13. Di trimologi kedua ini BBWSS VIII ini berharap fokus sudah mulai sedikit berubah, dulunya lebih ke ketahanan Pangan dulu, dan sekarang lebih Fokus ke daerah Banjirnya. Menyangkut status Pulau Belitung Sungai Kabupaten Belitung adalah wewenang Provinsi dan di Babel itu Sungai Bangka wewenang Pemerintah Pusat. Dan ada aturannya kalau irigasi diatas 3000 ha kewenangan Pusat, irigasi 1000 s.d 3000 ha wewenang Provinsi dan irigasi dibawah 1000 ha wewenang Kabupaten. Untuk Kabupaten Belitung sepanjang ada permintaan oleh Kepala Daerah, BBWSS VIII bisa masuk melakukan kegiatannya.
14. Menyangkut sinergitas bersama-sama DPRD untuk membantu BBWSS VIII Pembangunan KIS Embung Mentas, yang sudah dibangun tapi belum bisa dimanfaatkan, jadi memang ada semacam pembagian etika di BBWSS VIII untuk penyediaan Air Baku, jadi di Dirjen SDA itu mencari airluk dan dari Intake dibawa ke tempat Pengolahan itu batas BBWSS VIII, Mengolah ini adalah Dirjen Cipta Karya, hasil dari olahan ini namanya didistribusikan disebut jaringan distribusi oleh PDAM, jadi setiap tahunnya, BBWSS VIII diajak duduk bareng dikumpulkan seluruh indonesia, misalnya si PDAM untuk mengembangkan suatu wilayah.

15. Diharapkan kepada DPRD untuk mensosialisasikan kepada Kepala Daerah (Bupati dan Walikota) untuk mengatur PDAM.
16. Untuk tahun sekarang (2019) sedang dikerjakan di Kolong Mepayat Kabupaten Belitung, tahun ini targetnya akan ditutup lagi bendungannya, dan akan di tata Landscapnya dan pada Bulan Desember ini selesai. Dan Kolong Mepayat ini digunakan untuk PLTU.
17. Di Bangka Belitung, Kolong-Kolong yang ada dianggap Bencana Lingkungan, akan tetapi pada saat kemarau kolong-kolong yang ada sangat membantu Sumber daya Air Baku untuk Bangka Belitung, sehingga kolong-kolong tersebut dapat dikelola dengan baik.
18. Konsultan Daerah dilibatkan dalam perencanaan dan Desain, di semua daerah keinginan daerah melibatkan Konsultan daerah, tapi untuk Pekerjaan-pekerjaan dibidang Sumber Daya Air, memang tenaga ahli tersebut pusatnya hanya di Bandung dan Jakarta (terbatas), karena bursa kerja untuk Konsultan ada di Bandung dan Jakarta, sehingga gampang mendapatkan informasi. Makanya BBWSS VIII melibatkan Konsultan Supervisi dari Daerah, Konsultan Perencanaan dari Bandung dan Jakarta.
19. Semangat Komisi III DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk meminta pisah dari Sumsel itu, agar kiranya lebih terfokus, terintegritas dan lebih terkonsentrasi untuk membangun diBangka Belitung, karena ada beberapa kegiatan/proyek Strategis Nasional yang dibangun DiBangka Belitung, seperti ; KEK, Tanjung Kelayang, Air, PLTN dan lain-lain, kawasan-kawasan strategis Nasional yang dibangun Di Bangka Belitung yang sangat-sangat membutuhkan Air. Kami berharap agar wilayah Sungai Bangka dan Sungai Belitung menjadi satu, tidak lagi menginduk ke Sumsel, biar lebih terkonsentrisasi dan terintegritas untuk pembangunannya, karena kalau dulu prosesnya agak panjang birokerasinya (dari Sumsel dulu baru ke Jakarta) , maksudnya kami memangkas birokerasi yang ada.
20. Kenapa Komisi III DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung semangat memisahkan diri dari Sumsel dan mempunyai balai kecil sendiri, sebegitu banyak yang dibangun di Bangka Belitung, tetapi hampir 99 % tidak berfungsi, dan salahnya dimana? Apakah perencanaannya yang belum matang atau pelaksanaannya yang nakal. Mungkin dengan Balai yang kecil lebih terfokus, terinterigerasi dalam pembangunannya.
21. Harapan Komisi III DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung agar BBWSS VIII bisa membuat regulasi, dan Komisi III akan berkoordinasi ke Pusat DPR-RI perpartai untuk mendorong hal tersebut ke Kementerian sehingga bagaimana menyelamatkan Bangka Belitung, dan bagaimana memfungsikan apa yang sudah dibangun oleh Sumber Daya Air. Dan berharap lebih perhatiannya untuk Bangka

Belitung. Dan apa yang sudah dibangun oleh Cipta Karya tidak satupun yang berfungsi karena pipa dulu yang ditanam baru mencari Sumber Daya Airnya.

22. Berdasarkan BMKG pada Bulan November s.d Desember akan ada hujan yang tidak henti-hentinya dan mengakibatkan Banjir Besar di Kota Pangkalpinang dan mohon tindaklanjutnya dan ada sport-sport yang sudah dilakukan oleh BBWSS VIII
23. Adakah kewenangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk pemanfaatan Kolong-kolong yang ada di Bangka Belitung berdasarkan aturan yang ada.
24. Untuk Fungsi dari Pengawasan dan Perencanannya mohon minta data di tahun 2020 apa saja yang dikerjakan oleh BBWSS VIII dan di Jembatan Emas yang ada di Bangka Belitung abrasinya sangat besar. Mohon untuk ditindaklanjuti.
25. Untuk 3 (tiga) tahun terakhir, anggaran Banjir sangat minim, di tahun 2018 hanya dapat 1 (satu) paket untuk Bangka, karena memang Fokus Pemerintah Bapak Presiden (Bpk Jokowi) adalah ketahanan Pangan, seluruh Indonesia. Dan pada tahun 2020 *Direktur Sungai Pantai yaitu Bapak Jarot* akan lebih banyak dianggarkan ada 5 (lima) paket untuk Bangka Belitung.
26. Dan Untuk skala besarnya dari Loan Korea, untuk seluruh Kepulauan Bangka Belitung, Konsultan dulu akan turun, mendata banjir-banjir, baru masuk fisik. dan ada OP sungai untuk penanganan Khususnya Banjir oleh BBWSS VIII.
27. Ada Kolong Kacang Pedang dengan menggunakan dana Daba Provinsi yang diswadaya dikelola oleh kota Pangkalpinang tentang pengerukan. Pengerukan atau Normalisasi Sungai-sungai/kolong-kolong yang ada di Bangka di tahun 2019 sedang tahap pengerjaan, dan bertahap karena alatnya hanya satu.
28. Kalau pemanfaatan Kolong-kolong yang ada, bisa saja diProvinsi berperan dalam hal tersebut, dan BBWSS VIII sangat mendorong kolong-kolong tersebut milik Pemerintah Daerah agar kolong-kolong tersebut mempunyai sertifikat dan Peraturan Daerahnya.

V. PENUTUP

Demikian notulen rapat ini disampaikan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pangkalpinang, 22 Oktober 2019

**KETUA KOMISI III
DPRD PROVINSI KEP. BANGKA BELITUNG**

EFREDI EFFENDI





